



LEMBARAN DAERAH

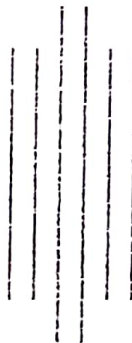
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 1995 SERI B NO. SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS
PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG
TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS
PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat serta membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dewasa ini ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tarif Retribusi Pungutan pada Rumah Sakit /Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak beserta segala perubahan yang materinya mengatur tarif Retribusi Pengobatan dan Puskesmas dirasa tidak

sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b dan c konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Darurat 1957 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Husada Bahkti ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bahkti menjadi Perusahaan Perseroan ;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684a/Menkes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. Persero Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/11/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandungan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;

- f. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan ruang rawat nginap untuk menolong pasien gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas, persalinan maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas kurang 10 tempat tidur, dengan dengan rata-rata hari perawatan 3 - 7 hari ;
- g. Puskesmas Pembantu ialah Puskesmas yang melaksanakan upaya pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang membawahnya ;
- h. Puskesmas Keliling ialah Unit Pelaksana Pelayanan Dasar keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas di wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan dasar ;
- i. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- j. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dasar dalam bentuk rawat jalan dan rawat nginap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas ;
- k. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima ;
- l. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap orang yang masuk Puskesmas Keliling untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan dasar lainnya tanpa tinggal diruang rawat nginap dan dilayani pada jam kerja ;
- m. Rawat nginap adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap orang yang masuk perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnose, pengobatan atau pelayanan kesehatan dasar lainnya ;
- n. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

- atas jasa pelayanan, obat-obatan atau pemeriksaan laboratorium dan medik ;
- o. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat nginap di Puskesmas Perawatan ;
 - p. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat/keterampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya ;
 - q. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
 - r. Tindakan terapi adalah tindakan pengumpulan data mengenai pasien, menganalisa atau merumuskan diagnose guna menentukan terapi dan mengevaluasi hasil terapi ;
 - s. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan dua puluh empat jam di Puskesmas Perawatan tanpa tinggal di ruang nginap ;
 - t. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk yustisi tentang apa yang dilihat, ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh pejabat yang berwenang ;
 - u. Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jasad jenazah dengan cara pemeriksaan luar dan dalam ;
 - v. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan kesehatan ;
 - w. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegaskan diagnose ;
 - x. Penderita yang tidak mampu adalah penderita yang nyata-nyata tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh :

- a. Puskesmas ;
 - b. Puskesmas Perawatan ;
 - c. Puskesmas Pembantu ;
 - d. Puskesmas Keliling.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling meliputi :
- a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat nginap ;
 - c. Pemeriksaan/pengujian kesehatan ;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat ;
 - e. Tindakan medik ;
 - f. Tindakan terapi ;
 - g. Laboratorium tertentu ;
 - h. Bahan dan alat kesehatan ;
 - i. Visum Et Repertum ;
 - j. Pemakaian mobil Puskesmas Keliling.
- (3) Jenis-jenis tindakan medik seperti tersebut pada ayat (2) huruf e Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Biaya rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis dan berlaku untuk sekali kunjungan.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan pembayaran atas jasa medik termasuk obat, bahan dan alat kesehatan tertentu sesuai dengan fasilitas yang ada di Puskesmas.
- (3) Karcis rawat jalan/karcis berobat disediakan oleh Kepala Daerah.
- (4) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu, tindakan medik dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan dan sesuai jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

Pasal 4

- (1) Komponen rawat nginap di Puskesmas Perawatan meliputi :
 - a. Akomodasi ;
 - b. Pemeriksaan Medik ;
 - c. Pemeriksaan penunjang Medik ;
 - d. Obat-obatan standart.
- (2) Tarif rawat nginap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat nginap ibu.
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan obat-obatan diluar standart yang diten-tukan, apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya perawatan.

Pasal 5

Pemeriksaan/pengujian kesehatan terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Kesehatan ;
- b. Surat Keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi pemeriksaan klinik sesuai fasilitas yang tersedia di Puskesmas .
- (2) Jenis pemeriksaan Laboratorium Puskesmas meliputi pemeriksaan :
 - H B ;
 - Golongan Darah ;
 - L E D / B B S ;
 - Angka Leukosit (AL) ;
 - F e e c e s ;
 - Angka Eritrosit (A E) ;
 - S p u t u m ;
 - ESBACH / Protein ;
 - Urine Rutin Lengkap ;
 - Test Kehamilan ;
 - Haemogram (DIFF) ;
 - Trombocyt ;
 - Malaria.

Pasal 7

- (1) Biaya pembuatan Visum Et Repertum meliputi bahan dan alat.
- (2) Biaya pembuatan Visum Et Repertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjaminnya.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya pemakaian mobil Puskesmas Keliling meliputi :
 - a. Bahan dan alat ;
 - b. Jasa pemeliharaan ;
 - c. Jasa pelaksana (sopir dan para medis pendamping).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan atas dasar pemakaian setiap jarak dari Puskesmas.
- (3) Pemakaian diluar ibu kota Kecamatan diperhitungkan sama untuk jarak 10 Km pertama.

BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas keliling dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :

a. Rawat jalan	Rp	500,-
b. Rawat nginap	Rp	4.000,-
c. Pemeriksaan/pengujian kesehatan	Rp	1.500,-
d. Perawatan gigi :		
1. Pencabutan	Rp	2.000,-
2. Penambalan	Rp	1.000,-
e. Tindakan Gawat Darurat	Rp	1.500,-
f. Tindakan medik operasi kecil	Rp	2.250,-
g. Tindakan medik operasi sedang	Rp	15.000,-
h. Visum Et Repertum	Rp	4.500,-
i. Pemeriksaan Laboratorium untuk penderita rawat nginap :		

1. H B	Rp	500,-
2. Golongan Darah	Rp	1.000,-
3. LED/BBS	Rp	500,-
4. Angka Leukocyt	Rp	500,-
5. F e e c e s	Rp	500,-
6. Angka Eritrocyt (AE)	Rp	500,-
7. S p u t u m	Rp	500,-
8. ESBACH / Protein	Rp	500,-
9. Urine Rutin Lengkap	Rp	1.000,-
10. Test Kehamilan	Rp	2.500,-
11. Haemogram (DIFF)	Rp	1.000,-
12. Trombocyt	Rp	500,-
13. Malaria	Rp	500,-
j. Pemakaian Mobil Ambulan	Rp	7.500,-
(Per 10 Km)		

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN
PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN/PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan anggota keluarganya dan yang menjadi peserta PT. ASKES INDONESIA dan dirawat nginap di Puskesmas dikenakan tarif rawat nginap sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif biaya pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas bagi anggota PT. ASKES INDONESIA akan diatur tersendiri antara PT. ASKES INDONESIA dengan Puskesmas.
- (3) Pelayanan Kesehatan dengan lembaga-lembaga lain/perusahaan akan diatur tersendiri antara lembaga tersebut dengan Puskesmas.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan pelayanan dalam bentuk rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 75 % disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara rawan Penerima Dinas Kesehatan ;
 - b. 25 % untuk keperluan pembiayaan Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling :
 - a. Biaya pembelian bahan dan alat ;
 - b. Biaya untuk rapat-rapat dan ongkos kantor lainnya ;
 - c. Biaya penyuluhan dan pembinaan ;
 - d. Biaya perjalanan Dinas ;
 - e. Biaya jasa pelaksana.
- (3) Pengaturan penggunaan 25 % sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Puskesmas Perawatan (rawat nginap) diatur sebagai berikut :
 - a. 75 % disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara wan Penerima Dinas Kesehatan.
 - b. 25 % dari pendapatan yang diterima dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional Puskesmas Perawatan dan dikelola masing-masing Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Hasil pendapatan Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dipergunakan untuk biaya operasional yang meliputi :

a. Biaya perawatan pasien	30% ;
b. Biaya pembelian alat medis, bahan dan alat serta obat habis pakai	20% ;
c. Untuk keperluan non medis termasuk administrasi	10% ;
d. Jasa pelaksana	40% ;

Untuk biaya konsultasi dokter ahli diambil sesuai besar jumlah kunjungan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Puskesmas dari pemeriksaan laboratorium diatur sebagai berikut :
 - a. 40 % disetorkan ke Kas Daerah melalui Benda Harawan Penerima Dinas Kesehatan ;
 - b. 60 % dari pendapatan yang diterima dipergunakan untuk menunjang kegiatan.
- (2) Terhadap penerimaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, penggunaannya diatur oleh Kepala Puskesmas untuk biaya laboratorium meliputi :
 - a. Bahan dan alat ;
 - b. Pelaksana medis ;
 - c. Pelaksana para medis.

Pasal 14

Penerimaan Puskesmas dalam pemakaian mobil Puskesmas Keliling diatur untuk keperluan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--------|
| a. Jasa Puskesmas | 10 % ; |
| b. Bahan dan alat | 45 % ; |
| c. Jasa para medis pendamping | 25 % ; |
| d. Jasa sopir | 20 % . |

Pasal 15

- (1) Petugas pemungut Puskesmas wajib menyetorkan pada Pengelola Keuangan Puskesmas dan dimintakan tanda terima dari Pengelola Keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Penerima pungutan biaya yang harus disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengelola keuangan penerima pungutan di Puskesmas seperti pada ayat (1) Pasal ini, wajib menyetorkan penerimaannya kepada Bendaharawan Penerima Dinas Kesehatan 1 (satu) minggu bagi Puskesmas yang dekat, 2 (dua) minggu sekali bagi Puskesmas yang sedang dan 1 (satu) bulan sekali bagi Puskesmas yang jauh.

- (4) Bendaharawan Penerima wajib menyetorkan semua hasil pendapatan pada Puskesmas kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dispenda dan mengirimkan laporan setoran dan surat pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PENGECUALIAN
Pasal 16

- (1) Kepada penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma atau keringanan baik di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Pelayanan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dengan diketahui Camat setempat dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan, serta bagi pemegang Kartu Sehat.
- (3) Diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada :
- a. Para peserta KB baru dalam upaya mendapatkan kontrasepsi, kecuali yang MANDIRI ;
 - b. Penderita akibat sampingan pemakaian alat kontrasepsi dengan surat keterangan dokter ;
 - c. Peserta KB ulang yang datang ke Klinik guna mendapatkan pelayanan dengan membawa kartu akseptor ;
 - d. Penderita yang tidak mampu/penderita yang dirujuk oleh Posyandu dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Posyandu yang bersangkutan dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan ;
 - e. Penderita yang dirujuk oleh guru taman kanak-kanak dan guru pendidikan dasar dan menengah dalam rangka usaha kesehatan sekolah di wilayah Kecamatan masing-masing ;
 - f. Penderita yang terkena penyakit menular yang pengobatannya termasuk program Pengembangan Pemberantasan Penyakit Menular ;

- g. Penderita Kehakiman yang dirawat karena suatu kasus tertangkap Penyidik dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari yang berwajib.
- (4) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan menurut pertimbangan Pimpinan Puskesmas sesuai dengan keadaan penderita, apabila karena kemampuan Puskesmas tidak memungkinkan maka pengecualian tersebut tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan/keluarga/penjaminnya berlaku Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Korban kecelakaan yang dirawat di Puskesmas kemudian meninggal dunia seketika atas permohonan keluarga/penjaminnya dapat dibebaskan dari biaya perawatan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1981 beserta segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

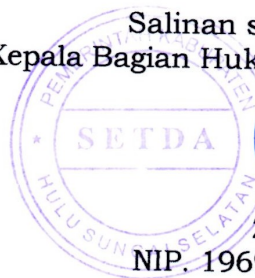
Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, Cap. ttd.
Cap. Ketua, ttd.	

S O E D A R N O

DRS.H.SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan

Nomor 55/SK-1/KUM.
Tanggal 4 Desember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan

Nomor 4
Pada tanggal 21 Desember 1995
Tahun 1995
Seri B
Nomor Seri 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap ttd

DRS. H. M. ARSYAD
Pembina Tingkat I
NIP: 010 045 675.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKERSMAS KELILING

I. U M U M

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya fungsi dan peranan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai pelayanan kesehatan dasar sekaligus juga sebagai pelayanan rawat nginap bagi pelayanan kesehatan, penyembuhan penderita, pemu lihan cacat badan dan jiwa, sehingga dipandang perlu adanya upaya untuk lebih memantapkan fungsi Puskesmas.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1981 tentang Tarif Retribusi Pengobatan pada Rumah Sakit Umum/Pembantu, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sementara dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Puskesmas yang nantinya juga berfungsi sebagai Puskesmas rawat nginap.

Selanjutnya untuk lebih menjamin keberhasi lan maupun peningkatan serta jangkauan pelayanan yang lebih luas, kiranya untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan perlu diatur ter sendiri dalam bentuk penetapan tarif biaya pelayan an kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keli ling.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (3)

yang dimaksud Puskesmas yang dekat adalah Puskesmas yang berada didalam kota. Puskesmas yang sedang adalah Puskesmas yang berada dalam radius 10 Km. Puskesmas yang jauh adalah Puskesmas yang berjarak lebih dari 10 Km dari Pusat Kota.

Pasal 16 sampai dengan 21

Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabuapten
Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.
Nomor 4 Tahun 1995
Tanggal 30 Juni Tahun 1995

DAFTAR : JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK PADA PUSKESMAS

a. K E C I L.

BEDAH

1. Extirpasi tumor-tumor superfisial seperti atheroma
2. Debridomen dan jahit luka di Poliklinik.
3. Insisi dan eksisi.
4. Merawat luka bakar kurang dari 10 z tanpa komplikasi.
5. Pemasangan traksi skeletal maupun traksi kulit.
6. Ganglion karpi dan ganglion pedis.
7. Reposisi diskolasi tertutup yang baru terjadi, tanpa anesthesi, tanpa gips, misalnya diskolasi rahang.
8. Biopsi kelenjar.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT DALAM

9. Tumor jinak alat angin luar.
10. Cauterasi.
11. Pasang implant, IUR KDR, injeksi.
12. Induksi.
13. D/C ekstirpasi.

M A T A

14. Ekstrasi corpus alinum tanpa komplikasi.
15. Ekstrasi calcium oxelat.
16. Jahitan luka kecil.
17. Gramulosa.

18. Chalazion, hordeolum, pinguecula.
19. Biopsi adheksa.
20. Probing ductus nasolacrimalis.
21. Canthoraphi, tarsoraphi, tarsotomy.
22. Nevus, petriogium ekstirpasi.
23. Wheelar, kista, tumor kecil jinak.
24. Tatuasa, kornea.

T H T

25. Biopsi kecil.
26. Eksplorasi nasho

GIGI MULUT

27. Cabut gigi sekali datang.
28. Tambal permanen satu gigi sekali datang.
29. Odontektomi satu elemen.
30. Alveolectosi.
31. Apeks sereksi, eksisi biopsi, insisi obses.
32. Faktur dental sederhana tanpa komplikasi.
33. Prenektosi.

SARAF DAN BEDAH SARAF

34. Biopsi saraf otot.
35. Overhecting.
36. Fungsi pengambilan cairan liquor.

KULIT DAN KELAMIN

37. Insisi/eksisi (abses, fibroma, kista ateroma).
38. Ekskultasi (Moluskum contagiosum, milium).
39. Penyuntikan intradermal dengan Triamsinolon asetonid (keloid).
40. Penyemprotan dengan kleritil (larva migrans) sekali datang.
41. Biopsi kulit.
42. Bedah Listerik (Verula vulgaris, kondiloma aluminata, klavus, skintag, keratesis, syringoma) dengan jumlah kurang dari lima, sekali datang.

43. Ekstraksi kuku (Roser plasty) tiap kuku.
44. Foto Terapi sekali datang.

A N A K

45. Endotracheai.
46. Lumbal Punksi.
47. Insisi veneklise.

PENYAKIT DALAM

48. Pengambilan cairan lambung/duedenum.
49. Punksi ascites.
50. Debridemen dan jahit luka kurang dari 5 cm.
51. Merawat luka bakar 10 % tanpa komplikasi.
52. Reposisi dislokasi tertutup yang baru terjadi tanpa anethesi.
53. Pemasangan spalk.
54. Pemasangan ransel perban.
55. Pemasangan imobilisasi dengan palster.
56. Melepas dan pemasangan catheter.
57. Pemasangan NGT.
58. Mengumbah lambung.
59. Pemasangan infus.
60. Pemberian obat parenteral (injeksi).
61. Melakukan punksi misal : lumbal, ascites.
62. Melakukan wash out pada bayi mteorismus.
63. Exsisi dan insisi.
64. Pemberian O2.

b. S E D A N G.

B E D A H.

1. Sirkunsisi.
2. Operasi hernia, hidrokkel, varikokel.
3. Secta alta.
4. Appendectomi electif.
5. Ektirpasi tumor jinak kulit, subkutis, payu dara, parotis, serta lain-lain pada wajah dan leher, tanpa komplikasi tetapi memerlukan anesthesi.

6. Labioplasti.
7. Luka bakar lebih dari 10 % pembersihan debri demen dan pembalutan dengan atau tanpa kompli kasi.
8. Ganglion poplitea.
9. Eksplorasi korpus alienum diluar rongga tubuh.
10. Tandur kulit kulit lepas, misalnya Thiersch atau full thichness skin grafting.
11. Lumbal Sympathectomi.
12. Synovectomi pada tendon atau sendi.
13. Operasi pembebasan pada tenosynovitis steno sen, antara lain De guarvain Trigger, finger, carpal tunnel syndrome, nerve intrappment.
14. Fraktura dan diskolasi tertutup reposisi de ngan menggunakan anesthesi umum serta inobili tasi gi.
15. Debridemen luka tanpa banyak komplikasi tetapi memerlukan anesthesi.
16. Debridomen fraktura terbuka derajat I dan II.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT DALAM

17. Kuretase.
18. Tumor jinak ovarium.
19. Myomectomy.
20. Laporatomi percobaan.
21. Kehamilan ektopik.
22. Partus normal, ekstraksi vakum/forsep pada per salinan.
23. Kuldokopi, diagnostik laparaskopi.
24. Operasi perinium, kolporaphia.
25. Salpingo-oforectomi.
26. Plasenta manuul.
27. Operasi Shirodear.
28. Sterillisasi.
29. Laporaskopi.

M A T A

30. Aplikasi Cryo.
31. Cryo diatermi.
32. Discisio cataracta suondaria.

33. Evisceratio.
34. Flap conjunctive.
35. Paracebthese.
36. Rekanalisasi.
37. Indirectomi Basal Perifer Sektoral.

T H T

38. Antrostomi sinus maxilaris.
39. Bronkoskopi.
40. Ekstraksi polip.
41. Tonsil Adenektomi.
42. Tracheotomi.
43. Edmoidektomi Intranasel.
44. Dosephaguskopi.

GIGI DAN MULUT

45. Erukloasi Kista.
46. Echokloasi.
47. Fraktur rahang sederhana.
48. Odontektomi lebih dari satu elemen dengan anestesi.
49. Sognestorektomi.
50. Protease lepas/ sebagian 1 gigi sampai 13 gigi.
51. Jembatan 1,2,3, gigi.
52. Reparasi protease.
53. Mahkota dan jembatan.

RUMAH SARA

54. Lorgat cranial.
55. Continueus Vantricular Drainage.
56. Ekstripasi Kista dermoid/opidermoid oranium.
57. Reseksi Ligamentum Carpi tranversum (Carpal cunnel syndrome)

PENYAKIT DALAM

58. Percutanecus Transhepatic Cholangiography.
59. Suprapublik puncture.
60. C P T.

KULIT DAN KELAMIN

61. Paket Listerik (Veruca Vulganis, kondiloma akuminata, klavus, skin tag, keratosis, syariongoma) dengan jumlah lebih dari lima.
62. Bedah beku (Karsinoma kulit, haemangoma).

A N A K

- 623 Biopsi hati, ginjal, paru-paru, ascites, usus.
64. Laryngoskopi.
65. Tranfusi santi.

PENYAKIT DALAM

66. Biopsi hati.
67. Aspirasi sumsum tulang.
68. Punksi pleura.

U G D

69. Debridement dan jahit luka 5 cm atau lebih.
70. Sirkumsisi.
71. Merawat luka bakar 10 % tanpa komplikasi.
72. Pemasangan gips.
73. Pengambilan korpus alienum dengan anestesi lokal.
74. Extervasi dari atherama, lipoma kecil, clavus, veruca vulgaris.
75. Pencabutan pen dengan anestesi lokal.
76. Melakukan vena seksi.
77. Biopsi kelenjar.
78. Penanganan pasien shock dan pingsan.
79. Penanganan pasien keracunan.
80. Penanganan pasien yang kena gigit ular.
81. Tranfusi dengan perawatan 24 jam.

c. B E S A R.

B E D A H

1. Operasi kelainan bawaan pada wajah.

2. Operasi neurabiroma luas.
3. Operasi kriptorkismus, megacolon, hipospadi, atresiani lebih dari 2 Cm.
4. Operasi tumor mammae, thyroid, rahang, paru, vaskuler, intraabdominal, retroperi, toneal, mediastinum.
5. Operasi semua jenis tumor.
6. Operasi penanganan luka dengan komplikasi dan memerlukan anestesi.
7. Operasi dengan pendarahan dalam rongga thorax, abdomen, saluran kemih, wajah dan rongga mulut.
8. Operasi hernia incarcerate, ileus obsruktif, abstruktif, saluran oleh benda asing, batu.
9. Operasi prostat.
10. Sympathectomi thorokal.
11. Eksplorasi benda asing dalam rongga badan yang sulit, dalam thorax, abdomen sendi otot yang dalam, muka dan kepala.
12. Operasi konginetal seperti dilaksanakan panggul konginetal, konginetal talipos equinovarium dan lain-lain.
13. Operasi membebaskan sendi dari kontaktur serta rekonstruksinya.
14. Debridemen pada fraktura terbuka derajat III.
15. Operasi reposisi Vaskuler, nervus periferi.
16. Operasi reposisi terbuka dan fraktura tertutup tanpa komplikasi.
17. Operasi fraktura maxillo facial dan mandibula.
18. Iamonektomi dan laminotomi.
19. Operasi pemindahan kulit secara skin flap maupun skin tube.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN.

20. Histerektomi vaginal/abdominal..
21. Tumor ganas ovarium.
22. Reparasi fistel dan tuba.
23. Sectio Casaria.
24. Histerophy.

MATA.

- 27. Ablatio.
- 28. Cataracta : Decisio lentis, ekstraksi katarak, intrakapularis, ekstraksi katarak lainnya.
- 29. Karateplastik, photosis plastik rekontruksi.
- 30. Strobismus correction.

T H I.

Septum reseksi

- 33. Decompresia reseksi.
- 34. Frotoi edmoidektomi - ekstranasal.
- 35. Mastio doktomi.
- 36. Timpone plastik.
- 37. Operasi Callvell lue.
- 38. Palastoplastik.
- 39. Paradoktomi.
- 40. Rinoplastik.
- 41. Rekontruksi hidung.

GIGI DAN MULUT.

- 42. Fraktur rahang dengan komplikasi.
- 43. Ostectomi.
- 44. Reseksi rahang.

BEDAH DAN SYARAF.

- 45. Eksplorasi plexus carvicalis, branhialis lumbo sacralis, sympatectomi.
- 46. Laminaktomi.
- 47. Radix dan syaraf perifer neurolysi.
- 48. Trepanasi hematoma.
- 49. Operasi arteria.
- 50. Ventriculo Caudal.

KULIT DAN KELAMIN.

- 51. Dermabrasi.
- 52. Bedah kosmetik. (Klepharoooooplasty, lipe suction).